

---

## STUDI PENERAPAN PENDEKATAN COMMUNITY LED ASSESSMENT AND PLANNING PROCESS (CLAPP-GPI) DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (RPJM-DESA) DI KABUPATEN BANTAENG.

Syamsu Alam  
Fatimah\*

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to describe the variable / information on the application-GPI CLAAP approach in the preparation of its medium-Village at 3 in the sample villages Bantaeng. This research is a descriptive study with qualitative approach in this case using inductive logic thinking. findings obtained through connecting, Indexing and interpretation of data / information obtained from in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). From the results of the study concluded that: (1) In general pengetahuan village community (village government, Village Facilitators and Villagers) on the approximation of Clapp-GPI, related sense, the importance berfokus on the poor and women (GPI) and principles / basic values Clapp-GPI memuaskan enough. (2) The survey results also showed that approximately 76.7% - 86.7% of respondents were very satisfied with the benefits of planning Rural Development in identifying and identifies poverty according to the perspective of the local community. (3) The survey results also showed that in general the respondents were satisfied and very satisfied with the application of the Clapp-GPI in the preparation of village plans-RKP Village beneficial to the improvement of quality of life, help to improve the quality of rural development planning, help in accessing and managing programs and kedesas budget entry.*

**Keywords:** *community led assessment and planning process (CLAPP-GPI), RPJM-DESA*

### PENDAHULUAN

Sejak tahun 2003, Program pengembangan CLAPP-GPI (Community Led Assessment and Planning Process, Gender Procerty Inclusive) di 4 Propinsi mulai dikembangkan ke mitra-mitra ACCESS (Australian Community Development and Civil Society Strenghtening Scheme) baik melalui jalur pengembangan kapasitas maupun pengembangan dan pengorganisasian di komunitas pedesaan. Pengembangan yang difasilitasi Mitra Samya (Lembaga Studi Partisipasi dan Demokrasi) atas dukungan AusAID-ACCESS, telah dilakukan dengan bekerjasama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan

---

\*) Dosen FKIP Unasman, fatimah\_unasman@yahoo.com

organisasi warga. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Proses ini dibuat dengan pengembangan pendekatan efektif yang mendukung pembangunan yang equitable dan berkelanjutan.

Pengalaman kurang lebih 10 tahun pengembangan CLAPP-GPI memberi banyak pembelajaran yang bermanfaat dalam menyumbang perwujudan dampak program ACCESS yaitu peningkatan kualitas kehidupan dan keberdayaan masyarakat miskin dan perempuan. Khususnya di Kabupaten Bantaeng ACCESS bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Mitra Samya dan LSM lokal telah memfasilitasi penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan disemua desa dan kelurahan. Pengalaman penyusunan RPJM-Desa/Kelurahan melalui pendekatan CLAPP-GPI, telah menjadi kebanggaan dan asset sebagai salah satu Kabupaten model di Propinsi Sulawesi Selatan dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif

Penerapan Pendekatan Fasilitasi melalui internalisasi nilai-nilai CLAPP-GPI dan mengembangkan pendekatan praktis perencanaan desa dan transformasi kapasitas masyarakat untuk mendukung proses perubahan/pembangunan di desa. Proses-proses dimaksud tentunya yang terkait dengan :

- GPI (menjamin keterlibatan aktif masyarakat miskin dan perempuan);
- dipimpin masyarakat;
- transparan/akuntabel;
- memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang dipinggirkan dan;
- berkesinambungan.

Belum idealnya pelaksanaan otonomi di tingkat desa mendorong keprihatinan para pelaku pembangunan. Sejak tahun 2003 Mitra Samya bersama sejumlah LSM/KSM di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi-Selatan, atas dukungan AusAID-ACCESS melakukan upaya khusus dengan mengembangkan instrumen CLAPP-GPI secara berkelanjutan.

Pada awalnya, CLAPP-GPI digunakan untuk penyusunan rencana oleh kelompok-kelompok kecil di komunitas, namun kemudian berkembang menjadi perencanaan pembangunan di tingkat desa. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan pengalaman CLAPP-GPI kedalam skema musrenbang, dan sejak tahun 2006 CLAPP-GPI secara khusus dirancang untuk menyusun RPJM Desa 5 tahun dan RKP Desa 1 tahunsertaterintegrasi dalam skema musrenbang.

Adanya RPJM Desa 5 tahun dan RKP Desa 1 tahun menumbuhkan rasa percaya diri pemerintah desa. Melalui program CLAPP, dilakukan pembenahan terhadap peran dan fungsi pemerintahan desa. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya juga mulai digali untuk membiayai pelaksanaan rencana pembangunan desa. Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam menyusun

APBDesa khususnya peluang memanfaatkan ADD serta meningkatkan kemampuan dalam menyusun Peraturan Desa dilakukan oleh Mitra Samya.

Pemerintahan dan masyarakat desa mulai mengelola pembangunan di desanya secara lebih otonom. Di Kabupaten Bantaeng, pemerintah desa mengembangkan regulasi pembiayaan pembangunan desa dengan mendorong keswadayaan masyarakat. Dari proses tersebut, desa telah memiliki asset yang pengelolaannya melalui wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), beberapa unit usaha seperti Usaha Waserda di Desa Kampiling. Hasil usaha waserda menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa. Selain itu, tuntutan otonomi desa seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang semakin menguat.

Dinamika yang terbangun tidak hanya pada tingkat desa namun juga pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Apresiasi dan respon positif terhadap berbagai agenda ACCESS juga ditunjukkan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. Respon positif pemerintah Kabupaten ditandai dengan semangat pemerintah kabupaten mengadopsi metodologi CLAPP untuk perencanaan, sharing pembiayaan program dan replikasi program pada desa-desa lainnya. Kondisi ini dimungkinkan karena pendekatan dan program yang dikembangkan mendukung pelaksanaan regulasi yang ada.

CLAPP-GPI menjadi pendekatan utama dalam perencanaan masyarakat dan penganggaran yang focus orang miskin dan perempuan (gender and poverty inclusive-GPI) di tingkat desa. Pendekatan CLAPP-GPI ternyata mampu membangun interaksi dinamis (mekanisme, relasi dan kepercayaan) antara masyarakat, LSM dan Pemerintah pada berbagai level. Kondisi ini memberi kontribusi terhadap tercapainya Pemerintahan Lokal (desa- kabupaten) yang demokratis.

Dasar pijak studi ini adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (pasal 66) tentang desa yang memberi ruang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan desa. Melalui latar belakang dan tujuan diatas, maka akan dilakukan analisis untuk menilai seberapa tepat seluruh proses dan mekanisme penerapan pendekatan CLAPP-GPI dalam penyusunan RPJM-Desa di Kabupaten Bantaeng. Olehnya itu maka permasalahan yang ingin dianalisis adalah:

1. Apakah masyarakat (orang miskin dan perempuan) serta pemerintah desa mempunyai pengetahuan & pemahaman yang jelas tentang pendekatan CLAPP-GPI yang menjamin keberpihakan pada perempuan dan orang miskin dalam perencanaan pembangunan desa ?
2. Apa manfaat perencanaan pembangunan desa dalam menemuknenali dan mengidentifikasi kemiskinan menurut sisi pandang masyarakat setempat?

3. Bagaimana tingkat kepuasan warga (terutama orang miskin dan perempuan) dan pemerintah desa atas manfaat pembelajaran Clapp-GPI dalam penyusunan RPJM-RKP Desa sebagai acuan utama pembangunan desa.

ACCESS merasa perlu untuk menekankan nilai keberpihakan pada perempuan dan orang miskin, karena pada umumnya perempuan dan orang miskin memiliki posisi yang lebih rentan dibandingkan kelompok laki-laki maupun kelompok yang memiliki latar belakang social ekonomi yang lebih kuat. pada umumnya perempuan mengalami subordinasi dan marginalisasi yang menyebabkan posisi perempuan di masyarakat tidak cukup kuat. Meskipun bentuk dan tingkat subordinasi perempuan berbeda-beda, tergantung pada budaya dan juga wilayah, namun bisa ditemukan beberapa hal yang sama. Diantaranya Townsend dan Momsen(1987, 28) mengatakan bahwa fenomena subordinasi perempuan ditunjukkan dalam bentuk kurangnya penghargaan terhadap hasil kerja perempuan dan kurangnya akses kepada pengambilan keputusan di bidang sosial-ekonomi dan politik, dibandingkan dengan laki-laki.

Di Indonesia, pada periode Orde Baru, relasi gender dan peran gender dikontrol dengan sangat ketat oleh negara (Robinson dan Bessel 2002, 3). Ideologi gender pada saat itu menempatkan perempuan sebagai "ibu" dan "istri", menempatkan laki-laki di domain publik dan "membatasi" peran perempuan di ranah domestik, seperti yang diartikulasikan dalam Undang-undang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur pembagian kerja dalam rumah tangga: perempuan adalah ibu rumah tangga sementara suami adalah kepala keluarga. Manifestasi dari pelabelan peran suami dan istri ini bisa dilihat di Pasal 34 (1 dan 2) dari UU Perkawinan tersebut: laki-laki bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan perempuan bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga. Pada kenyataannya, banyak perempuan yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik untuk menambah penghasilan maupun sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Ideologi gender tersebut kemudian juga dimanifestasikan melalui berbagai jalan, diantaranya melalui organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi pada negara seperti PKK dan Dharma wanita Sebagai organisasi yang memiliki struktur yang sangat kuat dari pusat sampai ke tingkat masyarakat, PKK dan Dharma Wanita memiliki pengaruh yang besar di dalam membentuk persepsi masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki. Peran perempuan dalam organisasi ini sesuai dengan penjabaran peran suami dan istri dalam UU Perkawinan. Implikasinya posisi strategis dalam organisasi ini disesuaikan dengan jabatan suami. Misalnya, ketua PKK di sebuah desa adalah istri dari kepala desa, terlepas dari sang istri mampu atau tidak dan mau atau tidak untuk menduduki posisi ketua.

Alasan lain fokus kepada perempuan adalah bahwa perempuan miskin lebih menderita daripada laki-laki miskin dan lebih menderita daripada sesama perempuan yang berasal dari kelas ekonomi yang lebih baik. Sudah jelas bahwa orang miskin menghadapi kondisi yang sulit, meskipun intensitas kemiskinan bervariasi di berbagai daerah. Kekurangan pangan, penghasilan yang minim, penyakit yang tidak diobati karena masalah biaya dan akses kefasilitas kesehatan, gizi buruk, rumah yang tidak sehat, lingkungan yang buruk, sulitnya persediaan air bersih, adalah beberapa kondisi umum yang dihadapi oleh orang miskin. Kondisi seperti ini memaksa orang miskin untuk menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya bisa bertahan hidup. Selain itu, orang miskin biasanya juga berpendidikan rendah atau malah buta huruf, yang tentu saja membatasi akses mereka pada informasi,

Birdshall dan McGreevey (1983, 3) menemukan fakta bahwa beban perempuan miskin lebih besar karena peran ganda mereka – sebagai orang yang harus mengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Perempuan bertanggungjawab untuk mengurus anak-anak, menyiapkan makanan, mengambil air dan kayu bakar, mencuci baju, membersihkan rumah, mengatur keuangan rumah tangga, yang menyerap sebagian besar waktu mereka. Namun, pekerjaan ini sering tidak dianggap sebagai “pekerjaan”, sehingga juga tidak diperhitungkan dalam “produksi” sebuah rumah tangga (Birdshall dan McGreevey 1983, 12-13).

Selain itu, penghasilan perempuan juga hanya dianggap sebagai “tambahan” penghasilan suami. Di samping itu, beban perempuan miskin menjadi berat karena fasilitas publik pada komunitas miskin biasanya juga sangat minim (Townsend dan Momsen 1987, 39). Kalau bagi komunitas dari kalangan menengah ke atas untuk mengambil air cukup membuka kran air atau untuk memasak bisa memakai gas/listrik, bagi perempuan miskin pekerjaan ini menghabiskan tenaga dan waktu yang tidak sedikit, karena mereka harus mencari air dan kayu bakar. Bagi Afshar (1987, 3) perempuan terpaksa menanggung beban berat di dalam mengurus rumah tangga, karena kemampuan ekonomi yang sangat terbatas untuk bisa melaksanakan tugas tersebut.

### **Perencanaan Pembangunan Desa Dengan Pengintegrasian Clapp-GPI dalam Skema Musrenbang.**

Rencana pembangunan desa yang disusun melalui sistem perencanaan pembangunan reguler (musrenbang) yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa disusun 5 tahun sekali, sementara RKP Desa disusun setiap tahun. RKP Desa disusun mengacu pada RPJM Desa dan sinergi dengan RPJM Daerah.

Tahapan penyusunan rencana pembangunan desa baik penyusunan RPJM Desa maupun RKP Desa secara umum terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. **Persiapan.** Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membangun kesiapan dalam berbagai hal untuk mendukung kelancaran proses yang akan dilakukan. Misalnya (1) kesiapan menyangkut alat dan bahan pendukung berupa dokumen hasil pemetaan apresiatif desa, (2) kesiapan tempat pelaksanaan sehingga dapat memberikan ruang bagi perempuan, warga miskin, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya untuk berpartisipasi, (3) kesiapan desain proses yang akan menjadi acuan pelaksanaan, (4) kesiapan tim perencanaan dan kepanitian (pembagian peran dan peningkatan kemampuan fasilitasi) serta (5) kesiapan para aktor yang akan berpartisipasi
2. **Pelaksanaan,** yaitu proses diskusi menyusun rencana program. Dalam hal ini penting dipastikan agar perempuan, warga miskin, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya berpartisipasi secara aktif dalam prosesnya. Mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga penting dipastikan agar proses penyusunan rencana benar-benar mengutamakan pada kekuatan yang diperoleh para kegiatan pemetaan apresiatif desa.
3. **Pelebagaan dan pengawalan rencana pembangunan.** Pelebagaan yang dimaksudkan yaitu proses legalisasi rencana pembangunan desa yang telah terusun (misalnya untuk RPJM Desa ditetapkan dengan Perdes RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa). Sementara yang dimaksudkan dengan pengawalan upaya yang dilakukan guna menjamin rencana yang terusun berjalan sesuai yang diharapkan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan logika berfikir induktif. temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik melainkan hasil connecting, indeksing dan interpretasi data/informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Sedangkan tipe penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai "eksplorasi dan klarifikasi" mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel/informasi yang berkenaan dengan masalah penerapan pendekatan CLAAP-GPI dalam penyusunan RPJM-Desa pada 3 desa sampel di Kabupaten Bantaeng, yaitu Desa Labbo Kecamatan Tompobulu, Desa Rappoa Kecamatan Pajjukkukang dan Desa Bontosalluang Kecamatan Bissappu.

Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan implementasi RPJM-Desa. Jumlah Informan perdesa 20 orang, terdiri 4 orang pemerintah desa (1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa dan 2 anggota BPD dengan memprioritaskan anggota BPD Perempuan), 4 orang (2 laki-laki

dan 2 perempuan) dari Fasilitator Desa, 12 orang ( 6 laki-laki dan 6 perempuan) dari Informan kunci yang direkrut dari berbagai latar belakang social dan organisasi warga setempat.

Tabel. 1. Jumlah Informan pada tiga desa sampel;

No.	Informan	Desa Bontobulaeng		Desa Baruga		Desa Rappoa	
		L	P	L	P	L	P
1	Pemerintah Desa	3	1	3	1	3	1
2	Fasilitator Desa	2	2	2	2	2	2
3	Informan Kunci	6	6	6	6	6	6
	Jumlah	11	9	11	9	11	9

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan berdasarkan wawancara dan story telling dengan berbagai pelaku perencana desa sebagai informan. Pengumpulan data ini dilengkapi dengan alat perekam (handycame). Teknik pengumpulan data seperti ini memungkinkan informan memberikan data sebanyak-banyaknya dan peneliti juga memiliki keleluasaan untuk menggali dan mengembangkan data sedalam mungkin sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh informan. Teknik ini dilakukan tertuma untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengintergrasian pendekatan dan nilai-nilai Clapp-GPI kedalam proses dan mekanisme Musrenbang. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan fasilitasi penyusunan RPJM-Desa dan kegiatan Musrenbang. Selain itu, dikumpulkan pula data penunjang/pembanding yang bersumber dari berbagai hasil penelitian melalui studi pustaka.

Pengolahan data meliputi connecting, indeksing dan interpretasi data pada masing-masing desa sampel, selanjutnya dilakukan kompilasi data pada ketiga desa yang selanjutnya diikuti pertemuan seluruh tim desa untuk memperdalam temuan studi dan rekomendasi.pertemuan ini juga menghadirkan SKPD terkait yang terkait dengan penyusunan RPJM-Desa.

## HASIL PENELITIAN

Kabupaten Bantaeng adalah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 125 km dari Kota Makassar. Secara goeografis terletak dalam posisi 5021'23-5035'26 Lintang Selatan dan antara 119051'42'-12005'26' Bujur Timur. Secara administratif (BPS Kabupaten Bantaeng, 2013); pemerintahan dibagi dalam 8 kecamatan yang dirperinci menjadi 46 (empat puluh enam) desa dan 21 (dua puluh satu) kelurahan.Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 sebanyak 176,699 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 82-605 jiwa dan perempuan

87.425. Adapun ketiga desa wilayah penelitian yaitu Desa Labbo Kecamatan Tompobulu, wilayahnya diatas pegunungan berjarak 23 km dari Ibukota Kabupaten Bantaeng. Penduduknya berjumlah 3173 jiwa (1529 laki-laki dan 1644 perempuan), kemudian Desa Bontosalluang Kecamatan Bissappu bertopografi berbukit-bukit, wilayahnya berjarak 12 km dari Ibukota Kabupaten Bantaeng dengan penduduk berjumlah 1812 jiwa (laki-laki 876 dan perempuan 936) dengan 477 Kepala Keluarga. Desa ketiga adalah Desa Rappoa, kondisi wilayahnya dataran rendah dengan ketinggian 250 m dari permukaan laut. berjarak 7 km dari Ibukota Kabupaten, penduduk berjumlah 1598 jiwa (778 laki-laki dan 820 perempuan) dengan 440 Kepala Keluarga.

Tabel 2. Daftar Keadaan Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Desa Sampel

Desa	Kategori K.K				Jumlah
	Sangat Miskin	Miskin	sedang	Kaya	
1. Labbo	97 (11%)	454 (51,4%)	300 (34%)	32 (3,6%)	883 (10)
2. Rappoa	79 (21,40%)	187 (50,67%)	61 (16,53%)	24 (6,50%)	351 (100)
3. Bontosalluang	69 (14,47%)	291 (61,01%)	108 (22,64%)	9 (1,88%)	477 (100)

### Pengetahuan umum tentang Pendekatan CLAPP GPI.

Umumnya responden yang diteliti menyatakan mengenal Pendekatan Clapp-GPI, walaupun hanya sebahagian kecil menyatakan tidak kenal. Jika di antara mereka diminta untuk menyebutkan nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam penerapan Clapp GPI tersebut, secara umum yang sering disebutkan adalah nilai partisipatif (pembangunan desa yang harus melibatkan atau fokus pada peran serta perempuan dan kaum miskin). Sedangkan Pengetahuan mereka tentang Konsep dasar Clapp-GPI (pengertian, visi dan Tujuannya) kurang dipahami. Berbeda dengan Fasilitator Desa dan Pemerintah Desa, pemahaman mereka tentang Clapp jauh lebih baik. Mereka mampu menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip Clapp GPI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dan Fasilitator Desa mengenal Arti Clapp-GPI dan prinsip dasar Clapp-GPI dengan presentase melebihi 83 - 100 %, namun ternyata warga masyarakat hanya 33,33%, ketika ditanyakan mengapa program pembangunan didesa harus melibatkan GPI, ternyata jawaban warga 66,7 %. Artinya pengetahuan warga terkait hal-hal yang berkaitan pengertian konsep atau pendekatan relatif kurang, tetapi dari segi memahami makna terutama melibatkan gender dalam program pembangunan, warga masyarakat cukup memahami. Hal ini juga menunjukkan

bahwa internalisasi nilai-nilai Clapp-GPI dikalangan masyarakat dan aktifis perempuan cukup berhasil tersosialisasi.

Menurut Pemerintah desa dan fasilitator desa Clapp-GPI cukup dikenal dan dipahami karena proses penerapan pendekatan Clapp-GPI betul-betul memberdayakan masyarakat desa, dalam arti semua proses dilakukan oleh masyarakat sendiri (masyarakat diposisikan sebagai subyek). Program terlebih dahulu diawali dengan Pemilihan Fasilitator desa secara partisipatif, kriteria dan penentuan fasilitator desa disepekatinya sendiri oleh masyarakat. Setelah itu pembekalan pengetahuan dan metodologi Clapp kepada Fasilitator desa. selanjutnya penyebar luasan kepada masyarakat oleh aktor-aktor lokal yang sudah dilatih dan dibina melalui asistensi teknis dari tenaga specialist. Dengan difasilitasi Fasilitator desa, warga melakukan desain perencanaan yang didalamnya tercakup kegiatan penyusunan peringkat kesejahteraan yang akan dipakai sebagai acuan untuk melakukan sensus dari rumah ke rumah (door to door), jadi ada diskusi warga untuk menentukan indikator kemiskinan dan penyebabnya menurut masyarakat setempat sampai kepada pendataan atau sensus social. Dengan pendekatan dan proses yang partisipatif, maka hasil pendataan rumah tangga merupakan baseline data desa yang dianggap akurat dan legitimate. Sehingga baseline data tersebut merupakan bahan utama dalam menyusun RPJM-Desa maupun untuk program-program pembangunan yang masuk didesa seperti PNMP Mandiri Perdesaan. dan pemerintah Desa.

### **Manfaat Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Menemukenali Dan Mengidentifikasi Kemiskinan Menurut Sisi Pandang Masyarakat.**

Salah satu program utama dalam skema perencanaan pembangunan desa dengan pendekatan Clapp-GPI adalah pengkajian kemiskinan dalam rangka pemutakhiran data kemiskinan berbasis masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Memperkenalkan satu pendekatan atau metode penetapan klasifikasi kesejahteraan penduduk secara partisipatif yang sesuai dengan kondisi dan kriteria lokal serta berdasarkan pemahaman masyarakat atas peringkat kesejahteraan yang ada didesanya; Memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan peringkat kesejahteraan penduduk desa dalam strata yang telah disepekatinya, yakni : Sangat miskin (kasi-asi Dudu), Miskin (Tau Kasi-asi), Sedang (Tau biasa-biasa/Tau masagena) dan Kaya (Tau Kalumannyang), serta sebaran rumah penduduk sesuai peringkat kesejahteraan dalam peta desa; Melakukan sensus sosial tingkat kesejahteraan secara door to door keseluruhan rumah tangga di setiap desa; Menyusun peringkat kesejahteraan penduduk. Setelah semua rumah tangga di setiap dusun sudah disensus, selanjutnya dilakukan pembobotan untuk menghasilkan tingkatan peringkat kesejahteraan penduduk kedalam empat tingkatan/kategori, yakni KK Sangat miskin, KK miskin, KK sedang dan KK Kaya.

Hasil tahapan pengkajian peringkat kesejahteraan menunjukkan bahwa Mayoritas responden mengaku puas (76,7-86.7%) dan sangat puas (15-23%) terhadap manfaat perencanaan pembanagunan desa dalam menemukan kemiskinan menurut sisi pandang masyarakat, hal tersebut dianggap sangat bermanfaat dalam melibatkan warga desa secara partisipatif untuk menemukan kemiskinan melalui hasil refleksi diri masyarakat.

CLAPP-GPI mampu diterapkan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi indikator kesejahteraan untuk menemukan siapa yang miskin secara spesifik dan terukur. Indikator tersebut sesuai dengan tipologi dan karakteristik masyarakatnya dan sangat mudah digunakan untuk sensus atau pendataan rumah tangga. Sehingga menjadi tepat ketika digunakan ditingkat komunitas tertentu, misalnya kampung, dusun sampai desa mereka. Pengetahuan masyarakat tentang siapa yang miskin, membantu mereka mengkaji mengapa mereka miskin menurut kacamata si-miskin baik dari pandangan laki maupun perempuan.

Di Desa Rappoa menemukan bahwa dengan indikator kemiskinan yang dirumuskan dan disepakati sendiri oleh masyarakat, maka masyarakat semakin bertanggungjawab atas program-program yang bernafaskan penanggulangan kemiskinan di desa. Disisi lain, Pemerintah desa telah mendapatkan data riil KK miskin. Pemerintah Desa merasakan bahwa "inilah data miskin yang sebenarnya". Ketika masyarakat menemukan bahwa luas lahan yang dikerjakan-lah yang menjadi indikator utama kemiskinan. Masyarakat memberikan alasan "luas lahan yang mampu dikerjakan dikaitkan dengan kemampuan kerja masyarakat miskin". Kemampuan kerja tersebut terkait dengan alokasi sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia sangat menentukan kaya tidaknya seseorang.

Dampak penting dari proses CLAPP adalah memberikan nilai tersendiri dalam merubah pola pikir Aparat Pemerintah Desa sampai Pemerintah Kabupaten, bahwa "kemiskinan dan solusi penanggulangannya sudah selayaknya secara langsung menanyakan kepada mereka yang miskin dimasyarakat". Hal tersebut muncul karena data tentang kemiskinan, sebab dan akibat kemiskinan serta akses dan control orang miskin terhadap sumberdaya, diidentifikasi secara partisipatif oleh masyarakat sendiri.

Temuan penting dari hasil CLAPP menunjukkan bahwa akses dan kontrol terhadap sumberdaya masih didominasi oleh kaum mampu/elit. Temuan ini telah memberikan kesadaran para elit di desa dan yang miskin untuk memulai memikirkan proses yang lebih adil dan setara. Seperti yang terjadi di Desa Mareda Nipa-Nipa. Saat ini ada penggunaan lahan dalam bentuk pinjam pakai. Misalnya ketika pemilik lahan tidak mengolah pada musim tertentu, maka boleh dipinjam pakai oleh yang tidak memiliki lahan. Pada saat panen, si pemakai

lahan memberi pengganti bibit untuk musim berikutnya kepada pemilik atau tergantung kesepakatan.

Hasil terpenting dari kegiatan CLAPP adalah meningkatnya keterlibatan perempuan dan keluarga miskin dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dan kepercayaan diri lebih besar dalam upaya bersama untuk mengelola pembangunan desa. Dalam konteks tersebut, CLAPP memberi ruang pihak luar untuk berkonsultasi langsung dengan orang miskin, agar bisa mempelajari cara mereka menangani masalah dan apa yang mereka lihat sebagai prioritas dalam komunitas mereka. CLAPP juga mengetahui bagaimana keputusan pembangunan desa dibuat, dan bagaimana memasukkan ide-ide agar mereka dapat mengontrol dan mempengaruhi inisiatif pembangunan masyarakat.

Ketika CLAPP-GPI menghasilkan RPJM Desa untuk 5 tahun dan RKP Desa untuk 1 tahun dengan pengarusutamaan kemiskinan dan gender, maka kontribusi besar telah diberikan masyarakat dalam mendorong strategi penanggulangan kemiskinan menurut suara si miskin dan memperbaiki ketidakadilan gender. Itu berarti berkontribusi dalam mendukung pencapaian MDGs secara kongkrit dan operasional di komunitas.

### **Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Manfaat Pembelajaran Clapp-Gpi Untuk Penyusunan RPJM-RKP Desa.**

Hasil survey yang berkaitan dengan kepuasan warga terhadap pelaksanaan perencanaan desa (RPJM-Desa) melalui penerapan pendekatan Clapp-GPI menunjukkan bahwa:

Responden merasa sangat puas (76.7%) terhadap proses CLAPP yang mampu meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa. Tingginya presentasi ini oleh karena para aparat desa (terutama Sekertaris Desa) mendapat kebijakan khusus yang disepakati warga desa tentang penunjukan sekretaris desa untuk terlibat dalam program pemberdayaan melalui pendekatan Clapp-GPI di Kabupaten Bantaeng. Oleh karena salah satu yang ingin diwujudkan adalah bagaimana melahirkan aktor-aktor lokal dipedesaan yang punya kapasitas memadai dan terampil dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan dipedesaan yang pro gender dan partisipatif.

Responden merasa sangat puas (86,7%) terhadap proses CLAPP yang mampu meningkatkan kapasitas fasilitator desa dalam memfasilitasi warga menyusun perencanaan desa. Pembelajaran Clapp-GPI untuk perencanaan desa yang partisipatif memberikan kontribusi yang impresif terhadap peningkatan kualitas Fasilitator desa. Sehingga para Fasilitator desa mampu berperan sebagai kader pemberdayaan masyarakat (KPM) sekaligus sebagai fasilitator pembangunan ditingkat desa.

Responden merasa puas (53,3%) dan sangat puas (46,7%) terhadap pembelajaran Clapp-GPI bermanfaat bagi peningkatan kualitas warga dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Tingkat kepuasan yang cukup memadai ini, menunjukkan bahwa pembangunan pedesaan yang direncanakan secara baik dan berkualitas berkontribusi terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perencanaan menjadi prasyarat penting agar pembangunan pedesaan memiliki arah dan orientasi yang jelas yang pada akhirnya berkontribusi kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perubahan nyata yang terlihat pada warga dan organisasi warga adalah perubahan paradigma dan keberpihakan yang jelas pada orang miskin dan perempuan, serta hubungan kemitraan yang terbangun antar warga dan antara Organisasi warga dengan pelaku pembangunan lainnya di Kabupaten. Jaringan yang dibangun oleh organisasi warga dan memperjuangkan isu yang sama, telah mampu mendorong pemerintah kabupaten mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, seperti program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di setiap Desa. Disisi lain, kapasitas OMS dalam melakukan fasilitasi dengan pendekatan CLAPP-GPI juga berkembang. Bahkan Pemerintah Kabupaten Bantaeng bersama OMS telah melakukan replikasi pendekatan CLAPP-GPI dengan dukungan ACCESS maupun pihak lain untuk pnyebarluasan pada desa-desa lain yang belum menerapkan penyusunan RPJM-Desa dengan pendekatan Clapp-GPI.

Mayoritas responden (86,7%) merasa sangat puas terhadap proses Clapp\_GPI dalam penyusunan RPJM-Desa dilaksanakan dengan semua prosesnya harus dijamin adanya keterlibatan perempuan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pedesaan yang pro perempuan tidak hanya sebatas retorika belaka atau jargon, tetapi betul-betul terimplementasi. Untuk menjamin keterlibatan perempuan dalam proses Clapp-GPI, didesain sedemikian rupa berbagai pendekatan dan metode Misalnya dengan penerapan kuota jumlah peserta yang harus berimbang antara laki-laki dan perempuan, serta memastikan keterlibatan kelompok orang miskin. Pemberdayaan di tingkat akar rumput ini pun dibarengi dengan peningkatan kapasitas melalui berbagai cara, baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan, kunjungan silang, maupun diskusi-diskusi di tingkat kelompok. Pelan tapi pasti, kepercayaan diri perempuan dan orang miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat meningkat secara signifikan. Hasil dari evaluasi dampak yang dilakukan setelah program ACCESS berakhir membuktikan bahwa perubahan terbesar yang dirasakan oleh komunitas dampingan ACCESS adalah aspek gender dan pemberdayaan masyarakat. Terjadi perubahan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, peran perempuan dan orang miskin di masyarakat meningkat,

dan masyarakat merasa bahwa kemampuan untuk mengelola program bertambah.

Bukti lapangan yang memperkuat penilaian warga dalam kategori “sangat puas” terhadap manfaat Clapp-GPI untuk RPJM-Desa bagi perempuan; 1). Perempuan sadar bahwa mereka mendapatkan haknya, yang sebelumnya tidak diperhatikan, apalagi mendapatkannya. Dalam proses perencanaan yang sebagian besar dilakukan melalui berbagai pertemuan, pesertanya harus seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diberi kesempatan untuk berbicara dan terlibat dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatan desa. 2). Kedua, Ada pengkajian terhadap akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya desa, sehingga muncul dorongan positif terhadap peran dan tanggung jawab mereka untuk pembangunan dalam keluarga dan dimasyarakat meningkat seperti; perempuan terlibat dalam pembangunan fasilitas kesehatan, sarana air bersih, pembentukan dan pengelolaan kelompok usaha simpan pinjam, pengelolaan kelompok untuk usaha industry rumah tangga. 3) Ketiga, Perempuan merasakan ada peningkatan dalam perubahan pola pikir, peningkatan keterampilan, berorganisasi, keberanian berbicara dan beraspirasi.

Hasil survei menunjukkan bahwa manfaat pembelajaran Clapp-GPI dalam mendorong keterlibatan dan keberpihakan pada kelompok miskin (marginal) dirasakan sangat memuaskan (85%). Hal ini bisa terjadi karena proses dan mekanisme penyusunan RPJM-Desa semuanya mengharuskan adanya keterlibatan dan keaktifan warga miskin. Jadi ada kebijakan dan pendekatan khusus yang bersifat affirmative terhadap orang miskin dan marginal lainnya terlibat secara penuh, hal ini sesuai prinsip Clapp-GPI bahwa warga miskin terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan dapat merasakan manfaatnya.

Hasil survei menunjukkan bahwa manfaat pembelajaran Clapp-GPI dalam mengakomodir kebutuhan perempuan dalam perencanaan desa dirasakan sangat memuaskan (86,7%). Capaian tingkat kepuasan warga yang sangat memuaskan ini mencerminkan proses penyusunan RPJM-Desa memiliki kualitas yang baik terutama keberpihakan terhadap kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan.

Hasil survey menunjukkan bahwa manfaat pembelajaran Clapp-GPI dalam mengakomodir kebutuhan orang miskin dalam perencanaan desa dirasakan sangat memuaskan (85%). Kepuasan terhadap terakomodirnya kepentingan orang miskin, oleh karena adanya proses Clapp-GPI yang sejak sosialisasi program sampai pada taraf implementasi memang yang selalu diinternalisasi adalah merancang program aksi untuk peningkatan kualitas hidup berdasarkan asset (potensi local) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

Hasil survei menunjukkan bahwa manfaat pembelajaran Clapp-GPI dalam mendorong pengelolaan tata pemerintahan local yang demokratis dalam pesernanaan desa dirasakan hanya dalam kategori puas (66,7%).Capaian tingkat kepuasan warga yang belum maksimal ini sebenarnya sudah cukup menggembirakan, karena pendekatan pembangunan yang diterapkan sebelumnya memang kurang partisipatif dan demokratis. Kualitas layanan public juga masih lemah.

Hasil survei menunjukkan bahwa manfaat pembelajaran Clapp-GPI dalam mendorong terbangunnya kesadaran wargadan pemerintahan desa atas ketidakadilan gender dirasakan "sangat puas" (76,7%).Capaian tingkat kepuasan warga ini, karena adanya pendekatan pendampingan pembangunan yang diterapkan melalui kader-kader lokal yang terlatih sehingga setiap saat dan kesempatan aktif melakukan pembekalan pengetahuan dan penyadaran tentang gender.

Hasil survei menunjukkan bahwa manfaat pembelajaran Clapp-GPI dalam mendorong lahirnya partisipasi keswadayaan masyarakat dirasakan "sangat puas" (75%).Capaian tingkat kepuasan warga ini, karena ketika desa memiliki dokumen perencanaan yang baik, maka membantu mereka dalam membuat keputusan partisipatif terkait perencanaan pembangunan untuk aksi-aksi jangka pendek yang pendanaannya tidak perlu menunggu dana yang berasal dari luar atau dari APBD, tetapi digalang melalui potensi desa (swadaya). Jadi ada skema perencanaan yang dirancang dengan memanfaatkan keswadayaan. Seperti pengecatan masjid, pembersihan saluran irigasi, tidak perlu memanfaatkan dana ADD atau APBD, tapi cukup dengan swadaya.

Temuan penting dari pembelajaran ini adalah membuka kesadaran baru bahwa sesungguhnya masyarakat memiliki kearifan yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pendekatan partisipatif yang demokratis, setara dan berkeadilan akan menyadarkan bahwa sesungguhnya akan lebih bijak apabila sejak awal masyarakat diajak terlibat dalam program pembangunan. Keterlibatan masyarakat akan membuka ruang dan menciptakan peluang untuk bertanggung jawab atas hasil analisis mereka. Apa yang dijelaskan Amir seorang Fasilitator Desa Bonto Salluang dalam sebuah refleksi CLAPP-GPI di Kabupaten Bantaeng mengungkap.

## **SIMPULAN**

1. Secara umum penegetahuan masyarakatdesa (Pemerintah Desa, Fasilitator Desa dan Warga Desa) tentang pendekatan Clapp-GPI, terkait pengertiannya, pentingnya berfokus pada orang miskin dan perempuan (GPI) dan prinsip/nilai-nilai dasar Clapp-GPI cukup memuaskan. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendekatan Clapp-GPI yang

diintegrasikan dalam skema perencanaan pembangunan desa dianggap berhasil, Program ini dijalankan melalui penguatan kapasitas warga lokal (Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa) agar memahami pendekatan pembangunan yang Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Inklusif terhadap orang miskin, perempuan dan kaum marginal lainnya. Jadi dapat disimpulkan program ini mampu berkontribusi dalam menghasilkan individu-individu warga lokal di setiap desa di Kabupaten Bantaeng yang memiliki kapasitas mentransformasikan pendekatan CLAPP-GPI untuk pengelolaan pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan desa.

2. Hasil survey juga menunjukkan bahwa sekitar 76,7 % - 86,7 % responden merasa sangat puas atas manfaat perencanaan Pembangunan Desa dalam menemukan dan mengidentifikasi kemiskinan menurut sisi pandang masyarakat setempat. Jadi penerapan pendekatan Clapp-GPI dalam Perencanaan Pembangunan Desa menghasilkan data kemiskinan yang legitimate, rakyat berdaulat memutuskan terkait kemiskinan didesanya, Juga sebagai baseline data bagi siapa yang membutuhkan, terutama untuk perencanaan pembanguana desa dan untuk program penanggulangan kemiskinan.
3. Hasil Survei juga menunjukkan bahwa secara umum responden merasa puas dan sangat puas atas penerapan Clapp-GPI dalam penyusunan RPJMdesa-RKPDesa yang bermanfaat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, membantu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa, membantu dalam mengakses dan mengelola program dan anggaran yang masuk kedesa. Dari sisi proses dan konten/muatan RPJMDesa responden merasa saangat puas bahwa proses dan kontennya merefleksi/mengakomodir kebutuhan/kepentingan perempuan dan kebutuhan/kepentingan orang miskin.

## **SARAN DAN REKOMENDASI**

1. Perubahan-perubahan (Pengetahuan, pemahaman dan sikap) yang terjadi ini tentunya perlu ditransformasikan kepada para pihak yang sebelumnya telah mengenal pendekatan CLAPP dan terus mengimplementasikannya di masing-masing wilayah. Selain itu, untuk dapat melakukan transformasi dengan baik melalui berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan/training, asistensi teknis dan konsultasi, ternyata para pihak (terutama personal Organisasi Masyarakat Sipil) masih membutuhkan penguatan kapasitas terkait dengan pengelolaan pembangunan (khususnya pembangunan desa). Bertumbuh kembangnya sumberdaya di tingkat wilayah tentunya akan mempercepat upaya transformasi dalam kerangka mendorong perubahan.

2. Studi ini merekomendasikan agar warga masyarakat dan pemerintah desa meningkatkan swadaya masyarakat dan kepemilikan local dalam perencanaan, pengimplementasian, pemantauan, evaluasi dan pembelajaran pembangunan pedesaan, membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM-Desa sesuai amanah PP 72/20005 dan Permendagri 66/20007.
3. Pemerintah Desa perlu upaya pro aktif (menjemput bola) untuk melakukan lobi, promosi, koordinasi dengan para pihak (kecamatan, SKPD, PNPM, donor, swasta dan lain-lain) dalam memperjuangkan pelaksanaan program-program dari RPJM-Desa yang belum terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS (Biro Pusat Statistik).1997. *Profil Kependudukan Indonesia*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development. Putting the Last First*. London:Longman.
- I Nyoman Oka dkk, 20005, CLAPP-Community –Led Assessment and Planning Process Menuju Kepemimpinan Rakyat, Mitra Samya-AusAID ACCESS
- Juliantara, Dadang dan Widiawati, Helmi (editor). 2005. *Advocacy PengarusutamaanGender*. Yogyakarta: IHAP dan ACCESS.
- Momsen, Janet Henshall. 1987. Introduction. In *Geography of Gender in the ThirdWorld*, (J. H. Momsen and J. G. Townsend (eds.), pp. 15-26. London: Hutchinson.
- Parker, Lyn. 2003. *From Subjects to Citizens. Balinese Villagers in the IndonesianNation-State*. Copenhagen: NIAS Press.
- Parry, Benita. 1987. Problems in Current Theories of Colonial Discourse. *OxfordLiterary Review*, Vol. 9, pp. 27-58.
- Robinson, Kathryn and Bessel, Sharon. 2002. Introduction to the Issues. In *Women inIndonesia, Gender, Equity and Development*, K. Robinson and S. Bessel (eds.), pp. 1-12.Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Shatifan, Nina. 2006. *Memotong Rantai Kemiskinan*. Bali: ACCESS.
- Townsend, J. and Momsen, J. 1987. Toward a Geography of Gender in DevelopingMarket Economies. In *Geography of Gender in the Third World* (J. H. Momsen and J. G. Townsend (eds.), pp. 27-81. London: Hutchinson.